



EDISI RABU 07 OKTOBER 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

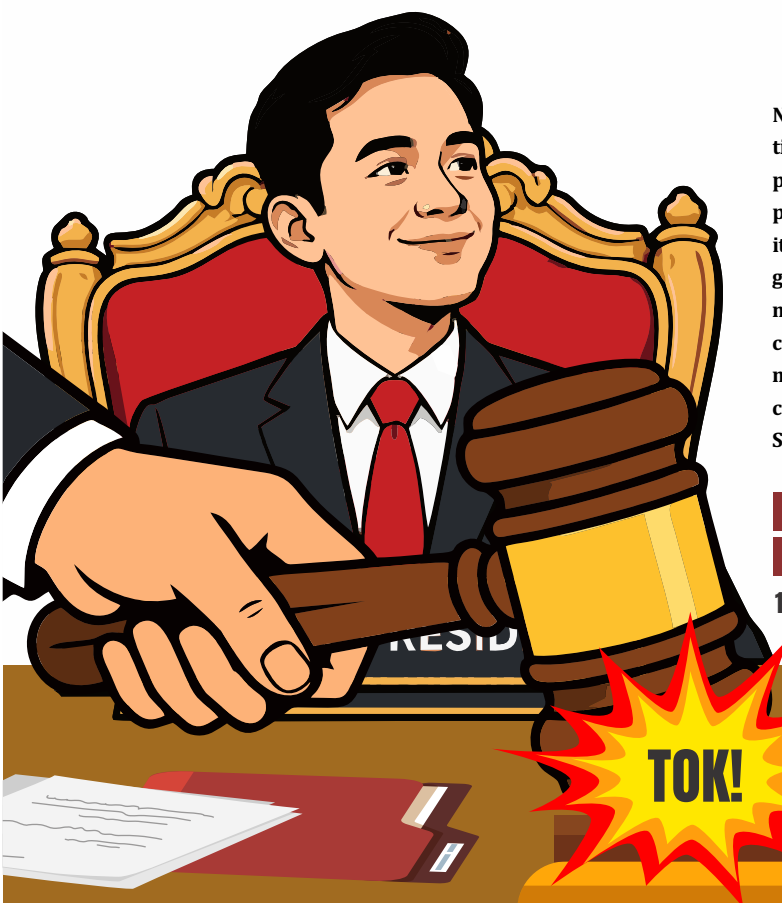
TODAY

**'Hujan Genteng' Buntut Ledakan di Pakuwon City**

Ledakan Rumah Makan Nasi Tempung Sri Dewi di San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Selasa (6/10/2026) pagi, membuat atap sejumlah rumah hunian warga maupun ruko berjatuhan. Warga menggambarkan situasi itu seperti 'hujan genteng'. Sebanyak 5 orang terluka. BPBD Surabaya mendata 42 ruko mengalami kerusakan dan 16 rumah warga ikut terdampak. Berita terkait baca Hal.4. (ist.ant)

TAK DITEMUKAN IJAZAH, KURSI WAPRES GIBRAN TETAP SAH

MK Sebut Pemohon Tak Memiliki Legal Standing



Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan kejanggalan penting dalam dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkapkan dalam putusan yang dibacakan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam. Ditegaskan tidak ada ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang meyakinkan sebagai bukti tamat pendidikan setara SMA. Mahkamah menggarisbawahi certificate of attendance yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan. Namun, fakta itu tidak cukup untuk menggugurkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden (Wapres). MK menyatakan gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara PHPU tersebut. Selain itu Gibran telah berubah status dari calon menjadi pejabat yang dilantik sejak 20 Oktober 2024. Para pemohon sebelumnya meminta MK mendiskualifikasi Gibran. Mulai dari membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Gibran sebagai cawapres, membatalkan pelantikannya, serta memerintahkan MPR memilih wakil presiden baru. Seluruh tuntutan itu kandas. BERSAMBUNG HAL.11

GUGATAN IJAZAH**GIBRAN KANDAS DI MK****12 PEMOHON | 1 PERKARA | 4 TUNTUTAN**

- Denny Indrayana dkk
- Denny Indrayana
- Brahma Aryana
- Ansufril ID Sambo
- Fachrul Razi
- Tyasno Sudarto
- Slamet Soebijanto

- Hanafie Asnan
- Soenarko MD
- Moeryono
- M. Subhan
- Bonatua Silalahi
- Tiurma M.S.
- Sihombing

**Mereka
mempersoalkan
syarat pendidikan
Gibran saat
menjadi cawapres
Pilpres 2024.*

APA YANG DIPERSOALKAN?**SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL
SMA/SEDERAJAT**

- MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA.

Dokumen yang disorot:
Certificate of Attendance

- Menurut MK, dokumen ini hanya membuktikan kehadiran dalam pembelajaran, bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan.

*Sumber: Berbagai Sumber Diolah***4 TUNTUTAN
PEMOHON**

- 01 — Diskualifikasi
- 02 — Batalkan KPU
- 03 — Batalkan Pelantikan
- 04 — Pilih Wapres Baru

TOK!**02**

GOVERNMENTTODAY
Satgas PKH Kuasai Kembali 6,27 Juta Ha Hutan
Prabowo: Senilai Rp 400 T, Bisa Perbaiki Sekola

05

NUSANTARA
Rapor Merah KPK untuk Kampus di Indonesia
Joki Skripsi dan Plagiarisme Masih Marak

10

LISTSTYLE
Tak Cukup Skincare, 6 Kebiasaan Ini Bantu
Samarkan Kerutan

Satgas PKH Kuasai Kembali 6,27 Juta Ha Hutan

PRABOWO: SENILAI RP 400 T, BISA PERBAIKI SEKOLAH

Presiden Prabowo Subianto menyebut kawasan hutan lebih dari 6,2 juta hektare yang telah dikuasai kembali pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memiliki nilai hampir Rp400 triliun. Menurut Prabowo, nilai sebesar itu menggambarkan besarnya kekayaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya perbaikan sekolah.



Tumpukan uang saat Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyaksikan penyerahan secara simbolik denda dan hasil penindakan pelanggaran hukum di bidang kawasan hutan dari Satgas PKH kepada negara di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (ist.dok)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VIII di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

"Enam koma dua juta (hektare) ini hampir Rp400 triliun, saudara-saudara, Rp400 triliun kita hilangkan kemiskinan. Rp400 triliun, berapa ribu rumah untuk rakyat? Berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki?" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian membandingkan nilai tersebut dengan anggaran renovasi sekolah yang telah dikeluarkan pemerintah. Ia menyebut sekitar 70 ribu sekolah telah diperbaiki sejak 2025 dengan anggaran sekitar Rp90 triliun dalam dua tahun. Dari perbandingan itu, Prabowo mengatakan nilai hampir Rp400 triliun secara teoritis cukup untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dalam skala nasional.

"Artinya, dengan Rp400 triliun berapa. Saya kira seluruh sekolah Indonesia bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah 360.000 sekolah. Rp400 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah Indonesia. Kita bisa perbaiki semua Puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun," kata dia.

Selain kawasan hutan, Prabowo menyoroti dampak penertiban terhadap sektor pertambangan timah. Ia mengatakan Satgas PKH telah menguasai kembali tambang ilegal sekitar 14 ribu hektare dan menekan penyelundupan timah di Pulau Bangka.

"Saudara-saudara juga telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal seluas 14 ribu, tapi dari sekian ribu hektare itu ada ratusan tambang yang sudah kita kuasai. Di Pulau Bangka, penyeludupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos tapi kita sudah tertibkan dengan keras," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, penertiban tersebut turut berdampak pada kinerja BUMN tambang timah. Ia menyebut PT Timah yang sebelumnya merugi mengalami kenaikan keuntungan hingga 900 persen dalam satu tahun. Pemerintah juga menyebut Satgas PKH telah menumbang sekitar Rp52 triliun dari denda, pajak, dan PNBP dalam rangkaian penertiban kawasan hutan.

Dalam acara yang sama, Prabowo menyebut penyerahan hasil kerja Satgas PKH telah berlangsung delapan kali dan melibatkan 12 institusi. Ia mengatakan total uang yang telah diserahkan mencapai sekitar Rp52 triliun atau setara sekitar 3 miliar dolar AS.

"Saudara-saudara sekalian, tugas kita masih berat, perjalanan masih jauh. Tapi, kemenangan sudah kelihatan," katanya.

Prabowo juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal di kawasan hutan untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Ia mendorong individu yang terlibat untuk menjadi justice collaborator sekaligus mengembalikan dana hasil korupsi. Bagi pemerintah, penertiban kawasan hutan kini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan kembali lahan.

Terbaru Serahkan Rp 13,24 T

Namun, angka Rp400 triliun yang disebut Prabowo perlu dibedakan dari uang yang telah disetorkan ke negara. Rp400 triliun merupakan perkiraan nilai kawasan hutan yang dikuasai kembali, bukan uang tunai yang telah masuk kas negara. Dalam penyerahan tahap VIII pada Selasa, Satgas PKH menyerahkan uang Rp13.241.335.681.910,13 atau sekitar Rp13,24 triliun kepada negara.

Dana itu terdiri atas Rp3,47 triliun denda administratif sektor kehutanan, Rp1,53 triliun PNBP Kejaksaan dari penanganan tindak pidana khusus, serta Rp8,22 triliun penerimaan pajak dari wajib pajak yang merupakan tindak lanjut kerja Satgas PKH.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan rincian lebih jauh mengenai luas kawasan yang telah dikuasai kembali. Selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, Burhanuddin mengatakan sejak pembentukan Satgas pada Februari 2025, penguasaan kembali kawasan hutan dari sektor perkebunan mencapai 6.260.220,14 hektare. Sementara dari sektor pertambangan mencapai 14.633,79 hektare. Dengan demikian, total kawasan yang dikuasai kembali mencapai 6.274.853,93 hektare.

"Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuknya Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6.260.220,14 hektare," kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Selasa (6/10). Ia menegaskan kawasan tersebut

GEBAKAN SATGAS PKH DALAM ANGKA

6,27 JUTA HEKTARE

Kawasan hutan dikuasai kembali Satgas PKH sejak Februari 2025

RP 400 TRILIUN

Perkiraan nilai kawasan hutan yang disebut Presiden Prabowo

RP 52 TRILIUN

Total uang yang disebut Prabowo telah diselamatkan/diserahkan dari denda, pajak, dan PNBP

RP 13,24 TRILIUN

Uang yang diserahkan ke negara pada tahap VIII, 6 Oktober 2026

RINCIAN KAWASAN

6.260.220,14 ha

Kawasan dari sektor perkebunan

14.633,79 ha

Kawasan dari sektor pertambangan

259.230,73 ha

Lahan yang diserahkan pada tahap VIII

selanjutnya dapat dikelola sesuai peruntukannya, termasuk untuk reforestasi.

Pada tahap VIII, kawasan yang diserahkan kembali kepada negara mencapai 259.230,73 hektare. Dari jumlah itu, 140.762,04 hektare berasal dari sektor perkebunan dan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola Agrinas Palma Nusantara. Kemudian 118.256,74 hektare berupa kawasan konservasi dan hutan lindung akan menjalani reforestasi, sedangkan 211,95 hektare dari kawasan pertambangan juga diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Burhanuddin mengatakan penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hasil penertiban dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi negara. "Kami menegaskan komitmen Satgas PKH untuk memastikan bahwa setiap hasil penertiban kawasan hutan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi negara," ujarnya. (tin,ist,kum,ant/dya)

UU Ketenagakerjaan Baru Disahkan IJAZAH TAK BOLEH DITAHAN, CUTI MELAHIRKAN TETAP DIGAJI

Pemerintah dan DPR RI tengah menyiapkan sanksi yang jauh lebih berat bagi pelanggaran over dimension over loading (ODOL) melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam usulan yang disetujui pemerintah, denda bagi pelanggaran ODOL dapat mencapai Rp50 miliar.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan regulasi tersebut disusun untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memperluas perlindungan bagi pekerja.

"RUU ini tidak hanya berhasil menyatukan dan menyelaraskan norma yang sebelumnya tersebar dan kerap memicu ketidakpastian, tetapi secara fundamental mengukuhkan pilar perlindungan ketenagakerjaan yang jauh lebih berkeadilan," kata Yassierli dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Salah satu ketentuan yang langsung menyentuh praktik hubungan kerja adalah larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Pemerintah juga mempertegas prinsip non-diskriminasi dalam rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, hingga hubungan kerja.

Selain itu, hak pekerja perempuan mendapat pengaturan lebih tegas. UU tersebut memberikan kepastian atas cuti melahirkan dan cuti karena keguguran berikut hak atas upahnya. Ketentuan mengenai hak pekerja perempuan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan kelompok pekerja yang rentan.

Dana Cadangan Pesangon

Perubahan lain yang menjadi perhatian adalah pengaturan dana cadangan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.

Yassierli mengatakan mekanisme tersebut diperlukan karena dalam praktiknya terdapat perusahaan yang tidak mampu atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pesangon ketika melakukan PHK.

"Terus kemudian ada hal yang baru, yaitu terkait dengan dana cadangan pesangon," kata Yassierli di Gedung DPR RI, Selasa.

Menurut dia, dana cadangan pesangon berbeda dari program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme teknisnya masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

"Akan ada dana cadangan pesangon dan detailnya nanti kita akan atur di PP," ujar Yassierli.

UU tersebut juga mengatur Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK. Pengaturan ini diarahkan untuk memberikan jaring pengaman ketika



Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima berkas pendapat akhir RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri) pada Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (ANTARA)

pekerja kehilangan pekerjaan.

Reuters melaporkan bahwa undang-undang baru tersebut juga memperketat sejumlah ketentuan PHK dan memperkuat skema perlindungan pesangon. Di sisi lain, kalangan pengusaha menyoroti kemungkinan meningkatnya biaya tenaga kerja akibat penguatan hak pekerja.

Outsourcing Diperketat

Ketentuan outsourcing juga mengalami perubahan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan regulasi baru memperketat praktik alih daya.

"Ada jaminan pesangon, lalu outsourcing betul-betul ketat dan tidak boleh orangnya yang di-outourcing, tetapi pekerjaannya. Sangat luar biasa perlindungannya," kata Andi Gani di Kompleks Parlemen, Selasa.

Untuk pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Andi Gani menyebut masa kontrak maksimal empat tahun. Skemanya terdiri atas kontrak awal dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama satu tahun.

Ketentuan pemagangan juga diperketat. Peserta magang mendapat kepastian status, batas waktu, uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, kepesertaan jaminan sosial JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan.

Andi Gani menyebut masa pemagangan dibatasi agar tidak

berubah menjadi bentuk pekerjaan terselubung.

"Pemagangan juga kita sangat ketat, tidak boleh pemagangan jadi lahan pekerjaan baru," ujarnya.

Ia menyebut pemagangan bagi siswa SMA maupun fresh graduate dibatasi selama enam bulan.

UU baru juga membawa perubahan dalam kebijakan pengupahan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

Peran Dewan Pengupahan Daerah juga diperkuat. Andi Gani mengatakan terdapat perubahan formulasi pengupahan, termasuk indeks tertentu atau alfa yang disebut dipatok pada angka 1.

Namun, untuk penetapan UMP 2027, pemerintah masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sampai aturan pelaksana UU baru diterbitkan.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Jumlah dan kapasitas pengawas akan disesuaikan dengan rasio jumlah pekerja dan perusahaan di setiap kabupaten atau kota.

UU baru mengatur pembentukan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan serta membuka ruang pengawasan oleh DPR.

Pengawas ketenagakerjaan juga diperkuat kewenangannya dalam pemeriksaan, pengumpulan data, hingga pemberian perintah perbaikan terhadap perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan.

6 HAK PEKERJA YANG BERUBAH

PKWT & Outsourcing

PKWT maksimal 2 tahun + 2 kali perpanjangan. Outsourcing dibatasi 5 jenis jasa.

Pekerja Informal & Platform

Berhak atas upah layak, jaminan sosial, penghasilan wajar, dan perlindungan K3.

PHK & Pesangon

Formula pesangon mengacu UU 13/2003. Perusahaan wajib menyiapkan cadangan pesangon.

Ijazah Tak Boleh Ditahan

Perusahaan dilarang menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.

Jam Kerja & Pekerja Perempuan

Maksimal 40 jam/minggu. Hak cuti haid, melahirkan, dan keguguran tetap disertai upah.

Pemagangan Diperketat

Ada batas waktu. Peserta mendapat uang saku, perlindungan K3, JKK-JKM, dan sertifikat.



Pemerintah menyiapkan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas, proporsional, dan berjenjang. Tujuannya bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga mencegah pelanggaran berulang.

Pengesahan UU ini mendapat respons positif dari Andi Gani. Ia mengklaim sekitar 90 persen aspirasi buruh telah diakomodasi dalam regulasi tersebut. "Saya puas karena memang mengakomodir 90% tuntutan buruh. Karena tidak mungkin 100%, kan," kata Andi Gani.

Ia menilai proses pembahasan beleid tersebut melibatkan serikat pekerja lebih jauh dibandingkan pembahasan sejumlah regulasi ketenagakerjaan sebelumnya.

Namun, sejumlah isu tetap menjadi perhatian. Sebelum pengesahan, kalangan pengusaha dan serikat pekerja masih menyoroti persoalan upah, PHK, pesangon, dan outsourcing. (tin,ist,kum/dya)

Ledakan di Pakuwon City Surabaya POLISI SITA TABUNG GAS 50 KG, DPRD SOROTI SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Polisi menyita tabung gas elpiji 50 kilogram beserta sejumlah peralatan dapur dari lokasi ledakan di Rumah Makan Nasi Tempong Sri Dewi, kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Selasa (6/10/2026). Di saat penyebab ledakan masih didalami, DPRD Surabaya menyoroti kepatuhan bangunan dan unit usaha terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pertanyaan pun muncul, sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap keselamatan bangunan yang telah digunakan sebagai tempat usaha.



Aparat membawa barang bukti tabung gas 50 Kg milik 'Nasi Tempong' yang merupakan lokasi ledakan di pertokoan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo. (ist)

Kepala Seksi Identifikasi Ditreskrim Polda Jatim, Kompol Sukris Tri Hartanto, mengatakan polisi mengamankan satu tabung LPG berkapasitas 50 kilogram berikut selang instalasinya. Polisi juga menyita kompor gas satu tungku dan kipas angin dari area dapur rumah makan.

"Dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini," kata Sukris di lokasi, Selasa (6/10).

Seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bagian belakang ruko yang digunakan sebagai dapur. Polisi belum memastikan sumber pemicu ledakan, termasuk apakah berkaitan dengan aktivitas memasak atau sumber lain. Barang bukti kini dianalisis oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. "Untuk saat ini masih dalam proses analisa oleh tim Bidlabfor Polda Jatim," ujar Sukris.

Sebelumnya, Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menyebut terdapat tiga tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kilogram di rumah makan tersebut. Dugaan sementara, ledakan berkaitan dengan kebocoran gas, bukan tabung yang meledak. Polisi juga memastikan tim Jibom Gegana tidak menemukan bahan peledak maupun unsur bom di lokasi.

Danden Gegana Satbrimob Polda Jatim Kompol Dyan Vicky Sandi menyebut fenomena ledakan lebih mengarah pada BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), yakni ledakan akibat tekanan gas yang terkumpul dalam suatu ruang kemudian terpicu. Namun, penyebab pasti kebocoran dan pemicu awal ledakan masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolrestabes Luthfie sebelumnya mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB ketika seorang koki sedang memasak. Koki tersebut disebut sempat mencium bau gas sebelum ledakan terjadi. Polisi menduga kebocoran bermula dari selang LPG 50 kilogram dan kemudian merembet ke dua tabung lainnya.

Kepatuhan 2.000 Lebih Unit Usaha

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, meminta Pemkot Surabaya tidak berhenti pada penerbitan perizinan. Pemerintah, menurut dia, harus memastikan bangunan yang telah beroperasi benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan, termasuk PBG dan SLF.

"Harusnya pemerintah kota ini betul-betul mengawal karena menyangkut keselamatan warga Kota Surabaya," kata Aning.

Aning mengatakan SLF bukan

sekadar dokumen administratif. Sertifikat tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bangunan laik digunakan. Karena itu, ia meminta Pemkot memperketat pengawasan dan penegakan aturan, termasuk terhadap unit usaha yang sudah beroperasi.

Sorotan itu berkaitan dengan data yang pernah diterima DPRD. Aning menyebut terdapat lebih dari 2.000 unit usaha yang berkaitan dengan kewajiban SLF. Berdasarkan data yang dimilikinya dari periode sebelumnya, baru sekitar 20-30 persen yang dinilai telah menyelesaikan proses SLF secara sempurna.

"Menurut saya pemerintah kota harus mulai menegakkan kembali aturan terkait SLF ini. Datanya sebetulnya sudah clear and clean. Berapa jumlah unit usaha di seluruh

Kota Surabaya yang belum mengurus SLF, belum memperpanjang SLF atau masih melanggar terkait dengan SLF," ujarnya.

Aning juga meminta Pemkot memiliki rekapitulasi yang lebih jelas, bukan hanya data pemohon SLF. DPRD ingin mengetahui jumlah bangunan yang telah beroperasi, sudah memiliki SLF, belum mengurus, belum memperpanjang, atau masih melanggar ketentuan.

Pemkot Surabaya sendiri telah menerbitkan Perwali Nomor 13 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas Perwali Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Aturan tersebut berlaku sejak 17 Maret 2025 dan ditujukan antara lain untuk meningkatkan efektivitas penerbitan SLF sekaligus keamanan dan keselamatan bangunan.

DPRD berencana kembali meminta penjelasan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), khususnya bidang yang menangani bangunan. Pembahasan tersebut juga akan dikaitkan dengan pembahasan APBD Surabaya 2027. Aning meminta pemerintah tidak hanya mengejar percepatan PBG dan investasi, tetapi memastikan keselamatan setelah bangunan digunakan.

"Jangan hanya mengejar retribusi pendapatan dan yang lain, tapi keselamatan warga harus diutamakan," tegasnya.

Ledakan di Ruko San Antonio terjadi sekitar pukul 07.11 WIB. Lima karyawan Rumah Makan Nasi Tempong Sri Dewi mengalami luka dan mendapat perawatan medis. Mereka adalah Eky (27), Windy Pratama (30), Kholifa (27), Moch Syofan (19), dan Liutami Matul Khoiriyah (23).

Dua korban kemudian dirujuk dari RSUD Haji ke RSUD dr Soetomo karena mengalami luka bakar dan trauma inhalasi. Dua korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Haji.

Jihan, salah seorang pegawai kedai bakmie yang berada di dekat lokasi kejadian, menyaksikan langsung momen mencekam tersebut. Dalam kondisi masih sadar, para korban berlari menuju tempatnya bekerja sembari menahan rasa sakit luar biasa. (ama,ist,ant/dya)



Rapor Merah KPK untuk Kampus di Indonesia

JOKI SKRIPSI DAN PLAGIARISME MASIH MARAK

Perguruan tinggi masih menghadapi persoalan serius dalam menjaga integritas akademik. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki tugas akhir atau skripsi terjadi di 91 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei. Sebanyak 43 persen responden perguruan tinggi melaporkan adanya mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir mereka.

Temuan itu disampaikan Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

“Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, ini seperti joki tugas ya. Ini di Dikti dilaporkan oleh 43 persen responden dan terjadi di 91 persen satuan pendidikan yang disurvei,” kata Dian. Praktik tersebut menunjukkan persoalan integritas bukan hanya muncul ketika mahasiswa menghadapi ujian, tetapi juga pada tahap penyelesaian karya akademik.

Masalah lain yang tak kalah luas adalah plagiarisme. KPK mencatat 48 persen responden perguruan tinggi melaporkan adanya praktik plagiarisme. Temuan itu terdapat di 93 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei. Pada saat yang sama, kecurangan dalam ujian dilaporkan oleh 50 persen responden perguruan tinggi dan terjadi di 94 persen satuan pendidikan tinggi. Dengan demikian, tiga bentuk kecurangan akademik—joki tugas akhir, plagiarisme, dan kecurangan ujian—muncul dengan cakupan institusi yang sangat luas dalam survei tersebut.

Persoalan integritas juga terlihat dari keberanian mahasiswa menolak praktik menyontek. KPK menemukan 18 persen responden perguruan tinggi tidak berani menolak menyontek ketika praktik tersebut dilakukan oleh teman-temannya. Kondisi itu ditemukan di 71 persen satuan pendidikan tinggi. Di jenjang dasar dan menengah, persoalan serupa ditemukan pada 18 persen responden dan terjadi di 43 persen satuan pendidikan. KPK juga menemukan peserta didik masih enggan melaporkan teman yang melanggar tata tertib.

Rapor integritas tidak berhenti pada perilaku mahasiswa. Dalam tata kelola pendidikan, KPK menemukan 8 persen laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai peruntukan. Dari temuan tersebut, bentuk persoalannya antara lain pemotongan atau pungutan sebesar 16 persen, nepotisme 40 persen, penggelembungan biaya 45 persen,



Ketua KPK Setyo Budiyo dalam acara peluncuran skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026). ANTARA

serta bentuk lainnya 41 persen. KPK juga mencatat pengadaan sarana pendidikan yang dinilai tidak transparan oleh 13 persen responden di jenjang dasar-menengah dan 29 persen responden perguruan tinggi. Di lingkungan kampus, promosi atau kenaikan posisi berdasarkan kedekatan juga ditemukan dalam 72 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei.

Meski berbagai masalah itu masih ditemukan, skor integritas pendidikan secara nasional justru meningkat. SPI Pendidikan 2026 mencatat Indeks Integritas Pendidikan sebesar 73,30 atau masuk kategori adaptif, naik dari 69,50 pada pengukuran sebelumnya. Survei tersebut mencakup 42.810 satuan pendidikan dengan 393.584 responden dari berbagai jenjang dan wilayah.

Khusus pendidikan tinggi, indeksnya mencapai 74,59. Namun, hasil per wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) menunjukkan kesenjangan: LLDikti II memperoleh 74,04 dan masuk kategori adaptif, sedangkan LLDikti XIV hanya 59,62 dan berada dalam kategori rentan.

Ketua KPK Setyo Budiyo mengatakan kenaikan skor tidak boleh membuat institusi pendidikan berpuas diri. Hasil survei, menurut dia, harus menjadi dasar untuk memperbaiki aspek yang masih bermasalah. “Sekolah boleh melahirkan orang cerdas. Kampus boleh melahirkan ahli. Tetapi hanya pendidikan yang berintegritas yang dapat melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya,” ujar Setyo. KPK menilai pencegahan harus dibangun sejak ruang kelas, bukan hanya mengandalkan penindakan ketika

pelanggaran sudah terjadi.

Kemdiktisaintek merespons temuan tersebut dengan mendorong penguatan keteladanan dosen, integrasi etika dalam kurikulum dan silabus, serta penegakan aturan yang lebih tegas. Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi memiliki komite etik yang dapat melakukan tindakan korektif terhadap praktik yang bertentangan dengan integritas akademik.

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menyebut hasil SPI sebagai “cermin” untuk melihat bagian yang masih membutuhkan pembenahan.

Bagi KPK, persoalan integritas pendidikan tidak sebatas soal nilai ujian atau kelulusan. Praktik menyontek, plagiarisme, hingga penggunaan joki menunjukkan bagaimana toleransi terhadap ketidakjujuran dapat tumbuh di lingkungan akademik. Karena itu, hasil SPI Pendidikan 2026 ditempatkan sebagai dasar rekomendasi untuk memperkuat karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola, tiga dimensi yang menjadi ukuran dalam survei tersebut.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menyisakan persoalan integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 8 persen laporan responden menyebut pemanfaatan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya.

Temuan tersebut disampaikan Pelaksana Harian Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi dalam

SPI PENDIDIKAN 2026

- 91%** Satuan pendidikan tinggi menemukan praktik joki tugas akhir/skripsi
- 43%** Responden perguruan tinggi melaporkan mahasiswa membayar pihak lain mengerjakan skripsi
- 93%** Satuan pendidikan tinggi menemukan praktik plagiarisme
- 48%** Responden perguruan tinggi melaporkan plagiarisme
- 94%** Satuan pendidikan tinggi menemukan kecurangan dalam ujian
- 50%** Responden perguruan tinggi melaporkan kecurangan ujian

BUKAN CUMA SOAL MENYONTEK

- 18%** Mahasiswa mengaku tidak berani menolak ajakan menyontek
- 71%** Satuan pendidikan tinggi menemukan persoalan tersebut
- 72%** Satuan pendidikan tinggi menemukan promosi/kenaikan posisi berdasarkan kedekatan



peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

“Dari dimensi tata kelola, masih terjadi pelaporan bahwa pemanfaatan dana BOS tidak sesuai dengan tujuan. Ini terjadi di 8 persen dari laporan dari responden kita,” kata Dian.

Dian memerinci bentuk persoalan yang ditemukan dalam laporan tersebut. Sebanyak 16 persen berkaitan dengan pemerasan, potongan atau pungutan. Kemudian 40 persen berkaitan dengan nepotisme, 45 persen berupa penggelembungan biaya penggunaan dana, dan 41 persen masuk kategori lainnya. Persentase tersebut merupakan rincian bentuk persoalan yang dilaporkan dan tidak berarti seluruh kategori tersebut berdiri secara eksklusif. (wid,ist,kcm/dya)

Jalan Veteran-Surabaya Ditertibkan Pemkot Malang Waspadai PKL Geser ke Titik Lain

MALANG - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Veteran dan Jalan Surabaya, Kota Malang, selama sebulan terakhir membuat 2 kawasan tersebut bersih. Namun, Satpol PP mewaspadai pedagang bergeser ke titik lain.

Diketahui, Satpol PP Kota Malang mendirikan pos pantau PKL di kedua lokasi. Selama beroperasi, petugas rutin melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada lapak yang kembali berjualan di badan jalan.

"Pos pantau ini efektif. Karena memang kemacetan di dua lokasi tersebut berkurang. Yang sebelumnya pedagang dan pembeli sama-sama memanfaatkan badan jalan, sekarang sudah kembali menjadi fungsi jalan semestinya," ujar Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Selasa (6/10/2026).

Jalan Veteran dan Jalan Surabaya menjadi perhatian karena berada di kawasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Jalan Veteran berada di sekitar Universitas Brawijaya (UB) dan sejumlah sekolah, sementara Jalan Surabaya berada di sekitar Universitas Muhammadiyah Malang (UM).

Keberadaan ribuan mahasiswa di dua kawasan tersebut turut menjadi faktor yang membuat aktivitas PKL di badan jalan ramai. Para mahasiswa yang menjadi konsumen PKL membuat aktivitas jual-beli di tepi jalan semakin padat, sehingga berdampak pada kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

"Bayangkan ribuan mahasiswa dua kampus besar ini membeli makanan ringan di area badan jalan, sehingga berdampak kemacetan, kesemrawutan, dan pelanggaran Perda," katanya.

Di sisi lain, Prayitno menyebut adanya sejumlah pedagang yang kemudian bergeser ke kawasan di luar titik pantauan. Meski sejauh ini pergeseran tersebut belum menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi ketertiban dan lalu lintas, Satpol PP tetap mewaspadai penumpukan PKL di titik baru.

"Kalau nanti di situ terjadi penumpukan, terlebih di area yang memang dilarang untuk PKL, maka kami harus tertibkan sesuai amanat Perda," tegasnya.

Saat ini, Satpol PP Kota Malang mulai mengidentifikasi sejumlah kawasan lain

yang berpotensi menjadi titik aktivitas baru para PKL. Khususnya, kawasan-kawasan yang menjadi ikon Kota Malang seperti Alun-Alun Merdeka dan kawasan Kayutangan Heritage. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas PKL tidak kembali menggunakan ruang yang mengganggu fungsi jalan maupun ketertiban umum.

Untuk diketahui, keberadaan pos pantau di Jalan Veteran dan Jalan Surabaya telah berlangsung selama sekitar satu bulan. Khusus Jalan Veteran, Satpol PP sebelumnya juga sempat menerapkan pola serupa selama lebih dari 10 hari pada Juni lalu.

Prayitno menyebut, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut terkait keberlanjutan pos pantau tersebut. Namun, melihat dampak yang muncul



selama pelaksanaan, pola pengawasan semacam ini dinilai berpotensi menjadi rujukan dalam kegiatan penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

"Kalau melihat fenomena yang ada, pola ini kelihatannya menjadi rujukan sebagai bentuk kegiatan tantrium yang efektif," katanya. (Santi/Dya)

Pengelolaan Sampah Jangkau 6.000 RT, Pemkab Malang Siap Perluas



MALANG - Program pengelolaan sampah di Kabupaten Malang kini telah menjangkau sekitar 6.000 rukun tetangga (RT) yang tersebar di 12 desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang pun mulai menyiapkan pengembangan program tersebut agar cakupannya dapat diperluas dan tidak berhenti sebagai proyek percontohan.

"Harapan kami program ini tidak terlalu lama dalam prosesnya. Penyelesaian persoalan sampah harus terus didorong agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Bupati Malang, Sanusi, Selasa (6/10/2026).

Dikatakannya, pengembangan program pengelolaan sampah tersebut dilakukan bersama Alliance to End Plastic Waste (AEPW) yang merupakan organisasi nirlaba global dengan fokus pada penanganan sampah plastik dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Hingga saat ini, melalui program bertajuk Bersih Indonesia: Eliminasi Sampah Plastik, implementasinya telah menjangkau sekitar 6.000 RT di 12 desa Kabupaten Malang, dengan masyarakat di wilayah sasaran mulai mendapatkan

edukasi dan terlibat langsung dalam pemilahan sampah dari sumbernya.

Adapun 12 desa tersebut tersebar di 5 kecamatan, yakni Desa Tulusbesar, Desa Duwet Krajan, Desa Jeru, Desa Benjor, dan Desa Kambingan di Kecamatan Tumpang. Kemudian Desa Wringinanom dan Desa Jambesari di Kecamatan Poncokusumo.

Selanjutnya, Desa Kenongo, Desa Slamparejo di Kecamatan Jabung; Desa Bunut Wetan, Desa Pakiskembar di Kecamatan Pakis; serta Desa Ngembal yang berlokasi di Kecamatan Wajak.

Menurut Sanusi, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Edukasi terus dilakukan untuk mendorong masyarakat membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah tangga.

Sanusi menegaskan, Pemkab Malang ingin memastikan program tersebut tidak berhenti pada tahap pilot project. Karena itu, diperlukan sistem pengembangan yang jelas, termasuk penguatan kemitraan dan dukungan

lintas sektor agar program yang telah berjalan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini merupakan pilot project yang sudah berjalan sejak satu tahun lalu. Kalau bisa berjalan dengan baik, tentu akan menjadi contoh dan menarik minat berbagai pihak untuk ikut mengembangkan program serupa di Kabupaten Malang," jelasnya.

Sanusi berharap program pengelolaan sampah tersebut dapat terus berjalan hingga akhir 2027 atau 2028. Setelah pelaksanaan tahap percontohan dinilai berhasil, program tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi model pengelolaan sampah yang lebih luas di Kabupaten Malang.

Selain mendorong perluasan cakupan, Pemkab Malang juga perlu memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Sanusi menekankan, pentingnya ketersediaan lahan yang diperlukan untuk mendukung proses transportasi dan pengelolaan sampah. (Santi/Dya)

Update Dugaan Wabah Pes di Rusia

PANTAUAN WHO: BELUM ADA KONTAK YANG BERGEJALA

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memantau kasus kematian seorang pekerja laboratorium di Institut Penelitian Antipes di wilayah Irkutsk, Siberia, Rusia. Hingga Selasa (6/10/2026), seluruh orang yang diketahui melakukan kontak dengan pekerja tersebut telah diidentifikasi dan menjalani pemantauan medis. Belum satu pun dari mereka menunjukkan gejala penyakit.

Juru bicara WHO Christian Lindmeier mengatakan informasi tersebut diperoleh dari otoritas Rusia. "Seluruh kontak pasien dilaporkan telah diidentifikasi dan sedang dipantau untuk mengetahui adanya penyakit. Hingga saat ini, tidak ada yang menunjukkan gejala penyakit," kata Lindmeier, seperti dilaporkan Reuters.

Kematian pekerja tersebut menjadi perhatian karena ia bekerja di fasilitas penelitian penyakit pes. Perempuan berusia 28 tahun yang diidentifikasi sebagai Darya Shipilova sebelumnya didiagnosis mengalami pneumonia berat dengan penyebab yang belum diketahui dan meninggal pada awal Oktober. Otoritas Rusia masih menyelidiki apakah kematiannya berkaitan dengan pes pneumonik.

Sampai kini, belum ada konfirmasi resmi bahwa korban terinfeksi Yersinia pestis, bakteri penyebab penyakit pes. Badan pengawas kesehatan Rusia, Rospotrebnadzor, menyatakan pemeriksaan tidak menemukan mikroorganisme yang berkaitan dengan pekerjaan korban dalam sampel biologisnya.

Rusia juga melaporkan tidak ada kasus pes di antara orang-orang yang melakukan kontak dengan korban. Sekitar 60 persen orang yang sebelumnya ditempatkan dalam karantina bahkan telah dibebaskan.

Kekhawatiran sempat meningkat setelah muncul laporan mengenai kemungkinan kecelakaan laboratorium yang melibatkan patogen pes. Sejumlah media menyebut korban diduga memecahkan tabung berisi patogen pes pneumonik pada 25 September. Namun, informasi mengenai insiden tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh otoritas Rusia. Karena itu, hubungan antara dugaan kecelakaan laboratorium, infeksi korban, dan kematiannya masih berada dalam penyelidikan.

WHO mengatakan telah meminta informasi lebih lanjut kepada pemerintah Rusia, tetapi hingga Selasa belum menerima tanggapan resmi. WHO terus mengikuti penyelidikan, termasuk kemungkinan pes pneumonik menjadi penyebab kematian. Badan kesehatan dunia tersebut juga menilai belum terdapat bukti adanya penularan lebih lanjut dari kasus tersebut.

Perkembangan ini juga mendapat



Para pekerja yang mengenakan pakaian pelindung melakukan pengujian di Rusia di tengah peningkatan langkah-langkah pencegahan, menyusul kematian seorang karyawan di sebuah institut penelitian anti-pes di Siberia. (East2West)

perhatian Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengatakan AS siap membantu Rusia menangani persoalan tersebut. "Ini masalah besar bagi Rusia. Sungguh prihatin melihat mereka menghadapi hal tersebut, mengingat ini adalah penyakit yang sangat berat," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (5/10). Ia menegaskan AS bersedia membantu negara mana pun yang menghadapi krisis kesehatan.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia menghargai tawaran bantuan Trump. Menurut

Peskov, penanganan kasus berada di bawah kewenangan Rospotrebnadzor yang terus memantau situasi dan akan menyampaikan informasi tambahan jika ada perkembangan baru.

Kekhawatiran juga merembet ke negara lain. Polandia melalui Inspektorat Sanitasi Utama (GIS) mengimbau warganya tidak bepergian ke Rusia. Namun, lembaga tersebut pada saat yang sama menegaskan belum ada sumber resmi dari Rusia maupun organisasi kesehatan internasional yang

mengonfirmasi adanya kasus pes pada manusia di Federasi Rusia.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk negara meski hingga 5 Oktober belum menerima notifikasi khusus dari WHO melalui International Health Regulations National Focal Point maupun Event Information Site. Kemenkes meminta Balai Karantina Kesehatan, rumah sakit, laboratorium kesehatan masyarakat, dan dinas kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan. (tin,rtr,ant/dya)

WABAH PENYAKIT PES DI RUSIA

Insiden Laboratorium

Peneliti 28 tahun di Institut Anti-Pes Irkutsk meninggal setelah tak sengaja memecahkan tabung sampel biologis hidup.

Penyebab

Pes disebabkan bakteri Yersinia pestis, bukan virus.

Pes Pneumonik

Varian paling berbahaya karena dapat menular antarmanusia melalui droplet. Gejalanya dapat berkembang cepat menjadi pneumonia berat dan berakibat fatal tanpa pengobatan antibiotik.

Sejarah

Yersinia pestis juga menjadi penyebab Black Death yang menewaskan jutaan orang di Eropa pada abad pertengahan.



Virologi: Penularan Tak Semudah COVID-19

Kekhawatiran mengenai kemungkinan wabah pneumonic plague di Siberia, Rusia, meningkat setelah seorang pekerja laboratorium yang menangani penelitian penyakit pes meninggal dunia. Namun, ahli virologi Angela Rasmussen menilai masyarakat luas tidak perlu langsung panik karena penyakit tersebut tidak mudah menular antarmanusia seperti COVID-19.

Dikutip dari CNN pada Selasa (6/10/2026), Rasmussen mengatakan langkah pemerintah Rusia menelusuri kontak dan menempatkan orang-orang tertentu dalam pengawasan merupakan respons yang masuk akal terhadap kemungkinan paparan.

Menurut dia, pneumonic plague memang sangat berbahaya, tetapi

penularannya membutuhkan paparan terhadap bakteri dalam jumlah cukup besar.

"Pneumonic plague ditularkan melalui jalur udara dan seseorang mendapatkannya setelah menghirup banyak bakteri penyebab penyakit tersebut," kata Rasmussen. Ia menambahkan, kondisi semacam itu biasanya terjadi dalam lingkungan dengan kontak sangat dekat, seperti rumah tangga atau rumah sakit.

Rasmussen juga menekankan bahwa penyebab penyakit pes adalah bakteri Yersinia pestis. Berbeda dengan COVID-19 yang dapat menyebar luas melalui populasi, penderita pneumonic plague tidak terus-menerus mengeluarkan bakteri dalam jumlah besar ke lingkungan. Karena itu, penularan biasanya membutuhkan

kontak dekat, terutama dalam lingkungan rumah sakit atau keluarga.

Kasus di Siberia menjadi perhatian karena korban bekerja di sebuah lembaga penelitian anti-wabah di wilayah Irkutsk. Menurut laporan, terdapat dugaan sebuah tabung berisi Yersinia pestis pecah ketika sedang ditangani peneliti. Namun, penyebab kematian korban hingga kini belum secara resmi dikonfirmasi sebagai wabah pes. (tin,ist,cnn/dya)

Waspada! Ayam Terlihat Sehat Belum Tentu Bebas Flu

Memelihara ayam di pekarangan rumah semakin diminati, terutama untuk memenuhi kebutuhan telur keluarga. Namun, unggas yang terlihat aktif, memiliki bulu bersih, dan makan dengan lahap belum tentu bebas infeksi virus. Pakar mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kondisi fisik ayam untuk memastikan kesehatannya.

Kebiasaan memelihara ayam petelur di lingkungan rumah atau urban farming memiliki sejumlah manfaat. Selain menyediakan telur untuk konsumsi keluarga, aktivitas ini juga menjadi alternatif pemenuhan pangan rumah tangga. Namun, ada aspek kesehatan yang perlu diperhatikan, terutama ketika pemilik berinteraksi langsung dengan unggas setiap hari.

Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah influenza pada unggas, termasuk influenza avian atau flu burung. Ayam yang terinfeksi virus tertentu tidak selalu langsung memperlihatkan gejala klinis. Karena itu, penampilan luar tidak dapat dijadikan satu-satunya patoka

n untuk memastikan unggas terbebas dari penyakit. aGuru Besar Universitas Airlangga (Unair), pakar biologi molekular Prof. Dr. drh. Chairul Anwar Nidom, M.S., mengingatkan bahwa ayam yang tampak sehat bisa saja sudah terinfeksi virus. "Akhir-akhir ini sering dijumpai kondisi tersebut, ayam yang terlihat sehat ternyata sudah terinfeksi virus tertentu," ujar Nidom.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang memelihara ayam di sekitar tempat tinggal. Pengamatan secara kasatmata tidak cukup untuk memastikan unggas benar-benar bebas dari infeksi.

Kenali Perubahan Perilaku

Pemilik ayam tetap perlu mengenali perubahan perilaku dan kondisi fisik unggas. Sejumlah tanda yang patut diperhatikan antara lain: Nafsu makan dan minum menurun. Ayam yang biasanya aktif mencari makan mendadak tidak tertarik pada pakan atau air.

Lebih banyak diam dan lemas. Unggas terlihat lesu, kurang bergerak, atau cenderung menyendiri.

Perubahan warna jengger. Jengger yang biasanya merah dapat terlihat lebih pucat. Gangguan pernapasan. Ayam mengalami batuk, bersin, mengeluarkan cairan dari hidung atau mata, hingga kesulitan

bernapas. Perubahan kotoran. Kotoran menjadi lebih encer atau mengalami perubahan warna dan konsistensi.

Produksi telur menurun. Ayam petelur menghasilkan telur lebih sedikit atau bentuk dan kualitas telurnya berubah. Kematian mendadak. Ayam dapat mati tanpa menunjukkan tanda sakit yang jelas sebelumnya.

Pengalaman Rita Andayani, kreator konten pemilik akun Instagram @kebun_samara asal Yogyakarta, menunjukkan pentingnya mengenali perubahan perilaku ayam. Selama hampir dua tahun memelihara ayam petelur di rumah, ia terbiasa mengamati kondisi unggas setiap hari.

"Kalau ayam yang sekiranya dia sakit itu dia pasti lemas, tidak nafsu makan. Terus warna jenggernya itu lebih pucat," kata Rita.

Tanda-tanda tersebut dapat menjadi petunjuk awal bahwa kondisi kesehatan ayam sedang menurun. Namun, gejala itu tidak secara khusus memastikan ayam terinfeksi influenza avian. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab penyakitnya.

Bagaimana Bisa Menular ke Manusia?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan, influenza avian atau flu burung merupakan penyakit akibat virus influenza yang terutama menyerang unggas, tetapi juga dapat menginfeksi mamalia, termasuk manusia.

Penularan kepada manusia terutama terjadi melalui kontak dekat dengan unggas yang terinfeksi atau lingkungan yang telah tercemar virus. Penularan dapat berlangsung ketika seseorang terpapar air liur, lendir, kotoran, maupun cairan tubuh unggas yang terinfeksi.

Virus dapat masuk melalui mata, hidung, mulut, atau terhirup bersama partikel di udara.

Risiko paparan lebih besar pada orang yang memiliki kontak langsung dan berkepanjangan dengan unggas terinfeksi t a n p a

perlindungan memadai. Gejala pada manusia dapat bervariasi, mulai dari demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, hingga gangguan pernapasan berat. Beberapa infeksi juga dilaporkan menyebabkan peradangan pada mata atau konjungtivitis.

WHO menegaskan bahwa penularan influenza avian antarmanusia secara berkelanjutan belum terbukti. Meski demikian, infeksi pada manusia tetap menjadi perhatian kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan penyakit serius.

Langkah Aman Beternak di Rumah

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) memberikan sejumlah panduan bagi masyarakat yang memelihara unggas di lingkungan rumah.

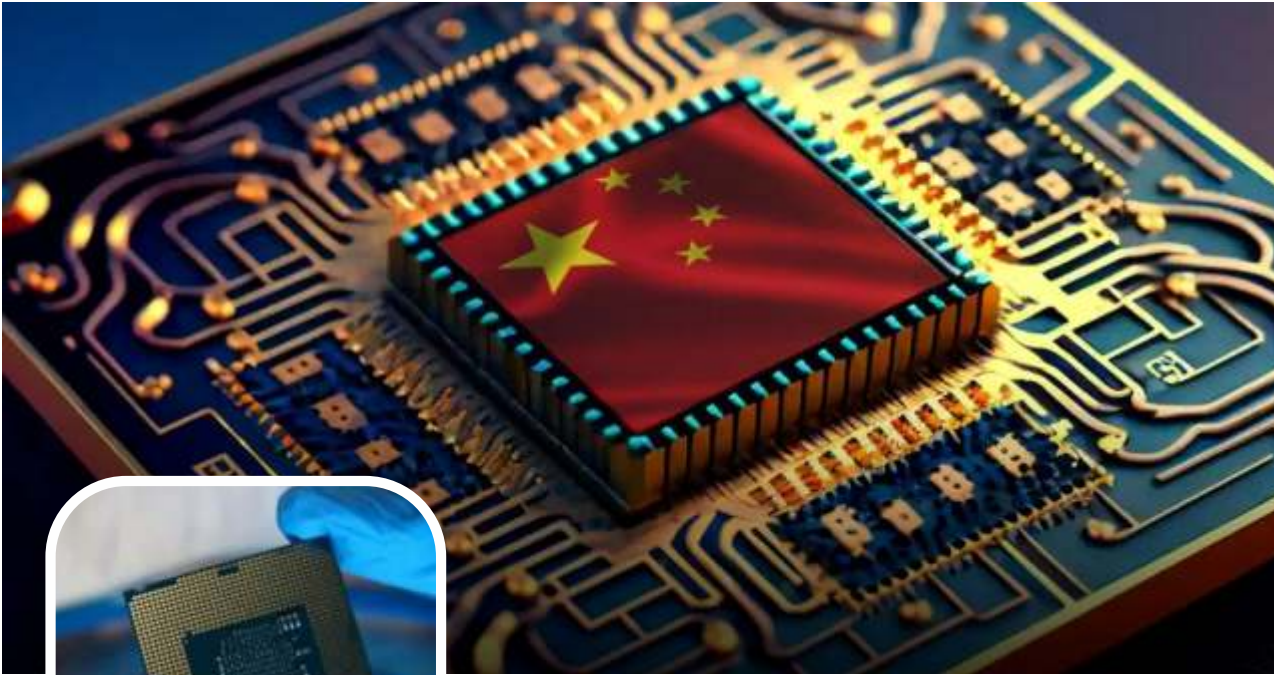
Pertama, pemilik sebaiknya tidak menyentuh ayam yang sakit atau mati tanpa perlindungan. Kotoran, alas kandang, tempat minum, dan permukaan yang mungkin tercemar juga perlu dihindari dari kontak langsung.

Kedua, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah memegang ayam atau membersihkan kandang. Ketiga, tempatkan kandang di luar rumah dan jauhkan unggas dari area penyimpanan, pengolahan, maupun penyajian makanan.

Keempat, jaga kebersihan kandang dan peralatan pakan serta minum. Unggas baru sebaiknya tidak langsung dicampurkan dengan kelompok ayam yang sudah dipelihara. Pemilik juga perlu berkonsultasi dengan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan jika menemukan gejala penyakit.

Untuk konsumsi, WHO mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih atau mengonsumsi unggas yang sakit. Daging ayam dan telur harus dimasak hingga matang. CDC juga menyebut pemanasan hingga suhu internal 165 derajat Fahrenheit atau sekitar 74 derajat Celsius dapat membunuh virus influenza avian pada produk unggas dan telur (far,ist/dya)

China Temukan Cara Bikin Chip Memori 100 Kali Lebih Awet



Peneliti China menemukan cara meningkatkan ketahanan material memori berbasis ferroelectric wurtzite hingga lebih dari 10 miliar siklus penulisan ulang. Terobosan ini menjawab salah satu persoalan utama teknologi memori generasi baru. Kehadiran material yang menjanjikan dari sisi kecepatan dan efisiensi, tetapi cepat mengalami kerusakan ketika digunakan berulang kali.

Penelitian tersebut dipimpin ilmuwan dari Xidian University dengan melibatkan peneliti dari City University of Hong Kong dan Fudan University. Hasilnya diterbitkan di jurnal Science pada September 2026 dengan fokus pada material aluminium scandium nitride atau AlScN, salah satu jenis wurtzite ferroelectric yang tengah dikembangkan untuk memori nonvolatil.

Angka 10 miliar menjadi penting karena perangkat berbasis material sejenis sebelumnya umumnya mengalami kegagalan setelah sekitar 100 juta siklus. Dengan kata lain, ketahanannya meningkat sekitar 100 kali dibandingkan angka tersebut. Namun, yang dilakukan

peneliti bukan sekadar membuat material lebih tebal atau mengurangi frekuensi penulisan. Mereka mencari sumber kerusakan pada skala atom dan menemukan peran penting kekosongan nitrogen, yakni cacat pada struktur kristal ketika posisi yang seharusnya ditempati atom nitrogen tidak terisi.

AlScN menarik perhatian karena memiliki sifat ferroelektrik. Secara sederhana, material ini mempunyai polarisasi listrik yang dapat diarahkan ke keadaan berbeda dan dipertahankan. Perubahan keadaan tersebut kemudian dapat digunakan untuk merepresentasikan informasi.

Karakter seperti ini membuat wurtzite ferroelectric berpotensi digunakan sebagai memori

nonvolatil. Data dapat dipertahankan meski sumber listrik dimatikan.

AlScN juga memiliki polarisasi tinggi dan dapat beralih keadaan dengan cepat. Selain itu, material ini menarik bagi industri semikonduktor karena berpotensi diintegrasikan dengan proses manufaktur yang sudah digunakan untuk chip.

Persoalannya adalah ketahanan

Ketika material terus-menerus menerima tekanan listrik untuk mengubah keadaan polarisasinya, cacat pada struktur kristal dapat berkembang. Pada penelitian terbaru, para ilmuwan mengidentifikasi pengelompokan nitrogen vacancies serta migrasinya dalam jarak jauh sebagai salah satu mekanisme yang menyebabkan arus bocor meningkat dan akhirnya memicu kerusakan dielektrik.

'Mengurung' Kekosongan Nitrogen

Untuk mengatasi persoalan tersebut, tim Xidian University mengembangkan struktur AlScN/AlN superlattice. Struktur ini dirancang agar pergerakan nitrogen vacancies dapat dibatasi secara spasial dan energetik.

Ibaratnya, peneliti tidak hanya memperkuat material setelah mengalami kerusakan, tetapi mencoba mencegah sumber kerusakan tersebut bergerak bebas sejak awal.

Mereka kemudian menggabungkan struktur tersebut dengan dynamic recovery protocol, atau mekanisme pemulihan dinamis. Pendekatan ini membantu menstabilkan konfigurasi cacat di dalam material ketika perangkat mengalami tekanan listrik berulang. (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tak Cukup Skincare, 6 Kebiasaan Ini Bantu Samarkan Kerutan

Kerutan merupakan bagian alami dari proses penuaan kulit. Namun, kemunculannya dapat diperlambat dengan kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan kulit, mulai dari disiplin menggunakan sunscreen hingga menjaga asupan protein.

Sejumlah ahli dermatologi dan perawatan kulit menilai, upaya menjaga kolagen sejak dini justru menjadi bagian penting dalam merawat kulit sebelum tanda-tanda penuaan semakin terlihat. Dalam artikel Vogue yang menjadi rujukan Beautynesia, praktisi keperawatan dermatologi bersertifikat sekaligus pendiri Bare Concierge, Michelle McFarland, mengatakan kebiasaan sehari-hari dapat memberi pengaruh besar terhadap kondisi kulit. "Pilihan yang kamu buat setiap hari lebih berpengaruh daripada produk yang kamu beli," ujar McFarland.

Menurut dia, tretinoin resep dan berbagai perawatan klinis tetap menjadi pilihan utama untuk menangani kerutan. Namun, pencegahan tidak selalu harus dimulai dari perawatan mahal. Perlindungan terhadap kolagen, hidrasi, pola makan, aktivitas fisik, hingga gaya hidup dapat menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit.

Berikut enam kebiasaan yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kulit tetap sehat dan mengurangi tampilan kerutan.

Jangan lewatkan SPF

Penggunaan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih setiap hari menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah

photoaging, yakni penuaan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. "Memakai SPF 30 atau lebih setiap hari adalah hal terpenting yang bisa dilakukan untuk mencegah photoaging," kata Carey Campbell, MD, dokter bedah plastik bersertifikat di Stark MD, Philadelphia.

Paparan UV dapat memicu munculnya garis halus, perubahan tekstur hingga pigmentasi. Karena itu, penggunaan sunscreen sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika matahari terasa terik, tetapi menjadi rutinitas harian.

Marisa Ponzio, MD, dokter kulit dengan dua sertifikasi di North York Dermatology Clinic, Toronto, juga menyarankan perlindungan tambahan berupa pakaian yang menutup kulit, topi bertepi lebar dan menghindari paparan matahari langsung sekitar pukul 10.00-16.00. Kacamata hitam juga memiliki fungsi lebih dari sekadar aksesoris.

Menurut ahli perawatan kulit Kate Daniel, kebiasaan menyipitkan mata dan mengerutkan dahi ketika menghadapi cahaya terang secara berulang dapat berkontribusi terhadap munculnya kerutan di sekitar mata.

Kenali vitamin A dan C

Rutinitas skincare dapat dilengkapi bahan aktif yang memiliki bukti manfaat terhadap tanda-tanda penuaan. Salah satunya retinoid, turunan vitamin A yang dapat membantu merangsang produksi kolagen dan elastin serta memperbaiki tekstur kulit.

Cheryl Karcher, MD, dokter kulit bersertifikat di New York, menjelaskan

retinoid dapat membantu mengurangi garis halus secara bertahap.

Untuk pilihan yang lebih lembut, bakuchiol yang berasal dari tumbuhan kerap digunakan sebagai alternatif retinol. Sementara itu, vitamin C dapat digunakan pada pagi hari sebagai antioksidan untuk membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas yang berkaitan dengan paparan sinar UV dan polusi. American Academy of Dermatology (AAD) juga memasukkan vitamin C dan retinoid sebagai bahan yang memiliki bukti manfaat dalam perawatan kulit.

Hidrasi dan skin barrier

Mengejar kandungan anti-aging bukan berarti mengabaikan kelembapan kulit. Funmilayo Adeola, ahli kimia kosmetik dan pendiri SwanPro Cosmetics, mengatakan banyak orang terlalu fokus mencari bahan anti-aging hingga melupakan skin barrier.

Kulit yang terhidrasi dengan baik cenderung terlihat lebih halus, sehat dan kenyal. Adeola menyarankan penggunaan humektan seperti hyaluronic acid dan glycerin, yang dapat dipadukan dengan bahan pendukung skin barrier seperti ceramide.

Rawat kulit dari dalam

Perawatan wajah bukan hanya soal apa yang dioleskan ke kulit. Menurut Daniel, makanan yang kaya antioksidan, vitamin C, polifenol dan lemak sehat dapat membantu melawan jenis kerusakan yang juga berusaha dicegah melalui perlindungan terhadap sinar UV.

Latihan kekuatan

Olahraga tidak hanya berkaitan dengan kebugaran tubuh. Karcher menyebut latihan kekuatan atau resistance training dapat membantu meningkatkan sirkulasi, tonus otot dan kesehatan kulit secara keseluruhan.

Latihan tidak harus dilakukan di pusat kebugaran. Squat, berjalan sambil membawa beban atau menggunakan dumbbell di rumah dapat menjadi pilihan sederhana untuk memasukkan latihan kekuatan ke dalam rutinitas.

Dengan sirkulasi yang lebih baik, oksigen dan nutrisi dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Namun, latihan fisik tetap perlu dipandang sebagai bagian dari pola hidup sehat, bukan sebagai pengganti perawatan kulit.

Pijat wajah secara lembut

Pijat wajah bukan metode untuk menghilangkan kerutan secara langsung. Namun, ritual sederhana ini dapat membantu membuat wajah terlihat lebih segar. "Menurut saya, pijat wajah bukanlah obat untuk kerutan," kata Daniel.

Menurut dia, pijat wajah dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan drainase limfatik sehingga wajah terlihat lebih segar dan tidak terlalu sembab. Praktisi Ayurveda Mangala Rao juga mengatakan pijat wajah lembut selama tiga hingga lima menit menggunakan minyak dapat membantu meningkatkan sirkulasi, mendukung drainase limfatik, meredakan ketegangan otot, dan membuat kulit terlihat lebih segar. (farist/dya)

Tak Ditemukan Ijazah,dari Hal 1

Ketua MK Suhartoyo memimpin sidang yang dimulai pukul 20.00 WIB. Hakim Konstitusi Arsul Sani mengata-kan Mahkamah telah mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap selama persidangan. Dari pemeriksaan itu, MK tidak me-nemukan dokumen yang menunjuk-kan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamat-kan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

"Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/ diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu," kata Arsul dalam persidangan.

Persoalan dokumen tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dalam persidangan, MK memperoleh keterangan bahwa dokumen yang menjadi pendukung surat penyetaraan tersebut bukan berupa ijazah atau diploma, melainkan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Mahkamah menilai dokumen-dokumen itu tidak dapat diposisikan sebagai bukti kelulusan.

"Certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," ujar Arsul.

Temuan itu sekaligus menjelaskan batas persoalan yang diperiksa MK. Certificate of attendance menunjuk-kan seseorang mengikuti proses pembelajaran, tetapi menurut Mahkamah bukan dokumen yang menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. MK bahkan membandingkan-nya dengan karakter umum ijazah atau sertifikat kelulusan yang menerangkan seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK tidak mengabulkan permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran. Mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara PHPU tersebut. Dalam rezim PHPU Presiden dan Wakil Presiden, pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan perkara ini diajukan



Suasana sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan perseorangan.

"Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo," ujar Hakim Konstitusi Liliek P. Adi.

Dalam amar putusan yang dibacakan Suhartoyo, MK mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum. Adapun terhadap pokok permohonan, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Awal Gugatan

Perkara itu diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Para pemohon mendalilkan syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan syarat yang wajib dipenuhi setiap calon presiden dan wakil presiden. Mereka meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat, mendiskualifikasinya dari pencalonan, membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Gibran sebagai cawapres, hingga membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Mereka juga meminta MPR diperintahkan menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sebagaimana mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Seluruh permintaan itu tidak dikabulkan karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain persoalan legal standing, MK mempertimbangkan perubahan status Gibran sejak Pilpres 2024. Mahkamah menyatakan perkara yang diajukan para pemohon secara substansial tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim sengketa hasil Pilpres karena Gibran bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.

Menurut MK, status tersebut berakhir ketika Gibran sebagai calon terpilih dilantik dan diambil

sumpahny sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Pelantikan itu sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pilpres 2024.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Mahkamah menegaskan persoalan mengenai tidak adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran pada akhirnya merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, MK menyatakan secara formal tetap berwenang memeriksa objek perkara yang dimohonkan, termasuk Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Mahkamah merujuk asas ius curia novit, yakni pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas dan tetap berkewajiban memeriksa serta mengadilinya.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan asas tersebut membuat MK tetap harus menggali kebenaran materiil dalam perkara yang diajukan.

"Dengan asas tersebut, Mahkamah bertanggung jawab menggali kebenaran materiil, alih-alih melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden setelah adanya pelantikan calon terpilih," ujar Enny.

Dokumen Pendidikan Krusial

Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran berpusat pada pendidikan yang ditempuhnya di luar negeri dan proses penyetaraan yang kemudian digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Dalam persidangan sebelumnya, keterangan pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi salah satu dasar pemeriksaan

**TEMUAN PENTING MK
TIDAK ADA BUKTI MEYAKINKAN
IJAZAH SETARA SMA**

Dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan antara lain:

- Certificate of Attendance+Academic Records +Explanation of Grades
- Tetapi, menurut MK, dokumen tersebut tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

**MENGAPA GUGATAN
TAK DAPAT DITERIMA?**

Legal Standing

- MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Status Gibran Sudah Berubah

- Gibran bukan lagi berstatus calon wakil presiden.
- Ia telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada:

20 OKTOBER 2024

Pelantikan menjadi penanda berakhirnya tahapan Pilpres 2024 dan berakhirnya statusnya sebagai calon.

KUNCI PUTUSAN

- MK menemukan persoalan pada bukti dokumen pendidikan, tetapi tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

MK. Mahkamah menyebut keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menguatkan fakta bahwa tidak terdapat dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang dilampirkan sebagai pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri.

Dokumen yang tercatat antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. MK kemudian menyimpulkan dokumen tersebut tidak menunjukkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Persoalan itu penting karena Pasal 169 huruf r UU Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Selain dokumen pendidikan, pemohon mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024.

Pemohon menilai ketentuan tersebut tidak boleh difiksirkan sebagai penghapusan syarat pendidikan sebagaimana diatur UU Pemilu. Mereka membedakan antara tidak memiliki bukti kelulusan dan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan.

Dalam persidangan, ahli pemohon Titi Anggraini mengatakan pengecualian dalam aturan KPU seharusnya tidak dimaknai sebagai pengecualian terhadap kualifikasi pendidikan yang diwajibkan undang-undang. (wid,ist,k,bis,kum/dya)



DPRD JATIM MATANGKAN RAPERDA TRANSPORTASI PUBLIK

Bidik Integrasi Moda hingga Perlindungan Warga

SURABAYA- DPRD Jawa Timur mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi. Regulasi tersebut diarahkan untuk menyatukan berbagai moda transportasi, memperkuat layanan pengumpan (feeder), hingga memastikan transportasi publik dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Hidayat, mengungkapkan transportasi publik semakin dibutuhkan masyarakat. Namun, layanan tersebut harus ditata secara terintegrasi agar perjalanan warga dari rumah hingga tujuan akhir dapat terlayani dengan baik.

"Perda ini bagi Komisi D sangat penting, karena transportasi publik hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi juga harus terintegrasi," ungkap Hidayat, Selasa (06/10/2026).

Menurut Hidayat, integrasi berarti seluruh moda transportasi antarmoda atau intermodal ditata dan dikelola agar layanan menjadi lebih efektif dan efisien. Konsep tersebut mencakup perjalanan dari rumah menuju angkutan penghubung (feeder), kemudian terhubung dengan simpul transportasi publik seperti terminal dan stasiun hingga tujuan akhir.

"Terpadu artinya apa? Artinya bahwa seluruh intermodal transportasi harus ditata, harus dikelola agar layanan transportasi publik bisa lebih efektif dan efisien. Bagaimana orang berangkat dari rumah menuju titik tujuannya itu harus terlayani dengan baik," jelasnya.

Hidayat berharap integrasi tersebut dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ia mencontohkan layanan Bus Trans Jatim yang menurutnya telah memiliki okupansi lebih dari 100 persen di setiap pemberangkatan.

"Agar apa? Agar masyarakat berbondong-bondong beralih dari transportasi pribadi kepada transportasi publik. Dari kendaraan roda dua pindah ke transportasi publik yang lebih aman dan nyaman," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim, menyoroti kebutuhan anggaran untuk mendukung pengembangan transportasi publik terintegrasi. Ia menyebut angka Rp1,5 triliun berdasarkan hitungan alokasi 5 persen dari APBD sebesar Rp30 triliun

sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono.

"Pak Nyono Kadishub menyampaikan, amanah undang-undangnya kan sebetulnya 5 persen dari APBD, maka kalau 5 persen dari Rp30 triliun saja, itu Rp1,5 triliun. Itu tidak hanya untuk Trans Jatim atau di daratnya saja, tapi juga untuk koneksi yang di laut. Kan kita enggak boleh terus mengenyampingkan kepulauan yang ada di Jawa Timur," terangnya.

Abdul Halim mengatakan Raperda tersebut mengarahkan penataan transportasi tidak lagi dilakukan secara parsial. Integrasi mencakup ketersediaan moda, simpul rute hingga integrasi tiket.

Trans Jatim nantinya dihubungkan dengan angkutan pengumpan atau feeder milik kabupaten/kota, stasiun kereta api, terminal, bandara hingga pelabuhan. Jaringan konektivitas juga mencakup Trans Jatim Laut untuk melayani wilayah kepulauan dan kawasan pesisir.

Dukungan terhadap feeder juga perlu diberikan kepada kabupaten yang memiliki kapasitas APBD kategori menengah dan bawah. Abdul Halim menyebut salah satu skema yang diharapkan dapat disiapkan adalah hibah atau bantuan khusus setelah Raperda menjadi Perda.

"Bahkan kalau kemudian bagi kabupaten yang memiliki APBD dalam kategori menengah dan bawah, itu kita berharap—kita memiliki skema ya, tapi ini belum diputuskan, ini next setelah Raperda itu menjadi Perda—yaitu kita berikan hibah, gitu. Bantuan khusus kepada kabupaten yang nantinya untuk adanya feeder di kawasan yang kemudian sebagai

penunjang Trans Jatim," jelasnya.

Pengembangan transportasi terintegrasi tersebut juga menyasar Trans Jatim yang telah beroperasi sejak 2022. Saat ini, layanan tersebut telah mencatatkan load factor melampaui 100 persen di delapan koridor.

Lebih lanjut, Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan menegaskan aspek perlindungan dan keadilan akses dalam penyelenggaraan transportasi publik. Menurutnya, layanan transportasi yang sulit dijangkau dapat membatasi akses masyarakat terhadap pekerjaan, sekolah, rumah sakit hingga kegiatan sosial.

Kelompok yang perlu mendapat perhatian antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan dengan perjalanan berantai, pekerja shift, pelajar, lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

"Dua moda angkutan bisa saja bertemu di satu halte atau terminal, tetapi perjalanan warga tetap terputus jika perpindahannya sulit, jadwalnya tidak cocok, tarifnya berulang, atau informasinya tidak jelas. Raperda ini diperlukan untuk menggeser fokus dari sekadar mengelola moda menjadi mengelola keseluruhan perjalanan warga," tegasnya.

Martin mengatakan persoalan perpindahan moda masih menjadi kendala masyarakat. Jadwal yang tidak cocok, tarif yang harus dibayar berulang kali, serta minimnya akses feeder menjadi bagian yang hendak dibenahi melalui regulasi tersebut.

"Selama ini, masyarakat sering

mengalami kesulitan saat berpindah moda angkutan akibat jadwal yang tidak cocok, tarif yang membengkak karena harus bayar berulang kali, serta minimnya akses angkutan pengumpan (feeder)," katanya.

Menurut Martin, integrasi transportasi publik juga diperlukan untuk menjawab tingginya mobilitas masyarakat di kawasan Gerbangkertosusila Plus. Kawasan tersebut menyumbang 53,5 persen perekonomian Jawa Timur dan mencatat sekitar 760 ribu perjalanan komuter per hari menuju Surabaya. Namun, baru 2,5 persen yang memanfaatkan angkutan umum.

Meski Trans Jatim mencatat lebih dari 8,1 juta penumpang sepanjang 2025, Martin menilai capaian tersebut belum membuktikan hadirnya sistem transportasi yang terintegrasi.

"Tanpa Perda, integrasi antara jalur utama, angkutan pengumpan, serta simpul transportasi seperti stasiun, terminal, dan bandara akan tetap sulit disatukan," urainya.

Pria yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini berharap pengesahan Raperda tersebut menjadi Perda dapat menjadi dasar penyelenggaraan transportasi publik yang aman, terjangkau, inklusif, dan terintegrasi bagi masyarakat Jawa Timur.

"Pengesahan Raperda ini menjadi Perda diharapkan menjadi pijakan hukum yang kokoh agar transportasi publik di Jawa Timur benar-benar hadir sebagai fasilitas umum yang aman, terjangkau, inklusif, dan terintegrasi bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (adv,pra/dya)



Wakil Ketua DPRD Jatim, Hidayat



Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim



Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan